PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN MELALUI SOSIALISASI MEDIA SOSIAL

Cholif fajrilla

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja

chfajrillah@gmail.com

Abstrak

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan aspek penting dalam memastikan keberhasilan pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Dalam era digital, media sosial memainkan peran krusial sebagai sarana sosialisasi yang efektif, memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses informasi, memberikan masukan, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana media sosial dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang, dengan fokus pada efektivitas sosialisasi yang dilakukan melalui platform digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memperluas akses informasi, meningkatkan transparansi, dan memungkinkan diskusi yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, media sosial juga memberi ruang bagi kelompok-kelompok terpinggirkan untuk menyuarakan aspirasi mereka, sehingga menciptakan proses perencanaan yang lebih inklusif. Namun, untuk mencapai potensi maksimalnya, diperlukan peningkatan literasi digital, pengembangan platform partisipasi yang lebih interaktif, dan responsif terhadap masukan masyarakat. Dengan demikian, media sosial berkontribusi signifikan dalam memperkuat demokrasi partisipatif dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Partisipasi, Musrenbang, Perencanaan, Media sosial

Abstract

Increasing community participation in Development Planning Deliberations (Musrenbang) is an important aspect in ensuring the success of development that is inclusive and responsive to local needs. In the digital era, social media plays a crucial role as an effective means of socialization, enabling people to more easily access information, provide input, and be involved in the decision-making process. This research uses a descriptive qualitative method with a literature study approach. This research aims to explore how social media can increase community participation in Musrenbang, with a focus on the effectiveness of socialization carried out through digital platforms. The research results show that social media expands access to information, increases transparency, and allows for more open discussions between government and society. In addition, social media also provides space for marginalized groups to voice their aspirations, thereby creating a more inclusive planning process. However, to reach its maximum potential, it is necessary to increase digital literacy, develop participation platforms that are more interactive, and responsive to community input. Thus, social media contributes significantly to strengthening participatory democracy and improving the quality of more equitable and sustainable development planning.

Keywords: Participation, Musrenbang, Planning, Social media

Pendahuluan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keterlibatan seluruh anggota atau perwakilan masyarakat untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan. Ini mencakup penentuan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diterima, serta cara pelaksanaan dan evaluasi hasilnya (Uceng et al., 2019). Namun, kenyataannya, partisipasi masyarakat dalam proses ini masih rendah di berbagai daerah. Rendahnya keterlibatan warga sering disebabkan oleh minimnya informasi yang mereka terima dan kurang efektifnya metode komunikasi yang digunakan oleh pemerintah dalam pembangunan, tujuan utama yang ingin dicapai adalah peningkatan taraf hidup masyarakat.

Partisipasi masyarakat memiliki dua karakteristik utama, yaitu proaktif dan reaktif, di mana masyarakat cenderung berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Terdapat persetujuan yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat yang terlibat, serta tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut. Selain itu, terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab (Samad et al., 2019). Ada berbagai faktor yang dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Faktor-faktor ini dapat berkontribusi pada keberhasilan kegiatan, namun ada beberapa faktor yang bisa menghambat pencapaian kesuksesan, seperti usia, keterbatasan harta, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan yang terbatas (Samad et al., 2019).

Partisipasi masyarakat memegang peran krusial. Partisipasi ini dapat dibangun dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam proses pembangunan, sehingga desa dapat berkembang secara mandiri melalui perbaikan kondisi dan pemenuhan kebutuhan dasar warganya. Untuk mendorong keterlibatan masyarakat, pemerintah menyesuaikan program-programnya agar selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan bukan hanya dilihat sebagai sebuah proses, tetapi juga sebagai hasil yang diharapkan. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi suksesnya pembangunan desa. Partisipasi ini bukan hanya kewajiban, tetapi juga hak setiap individu untuk berperan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan. Sebagai pihak yang paling memahami potensi dan tantangan di lingkungan mereka, masyarakat berhak menentukan pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat (Samad et al., 2019)

Partisipasi masyarakat menjadi prioritas utama dalam musyawarah desa, karena masyarakat berperan sebagai subjek pembangunan. Mereka terlibat langsung dalam proses dan turut merasakan dampak dari kebijakan serta kegiatan pembangunan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur mengenai Perencanaan Pembangunan Desa (Hadawiya et al., 2021).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa merupakan regulasi yang penting untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan demokrasi di Indonesia, terutama di tingkat desa. Namun, penerapannya harus memperhatikan beberapa tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya.

Forum musyawarah merupakan wadah yang efektif untuk menampung aspirasi masyarakat sekaligus memberdayakan mereka serta mendorong partisipasi sebagai subjek dan objek dalam proses pembangunan. Pembangunan seharusnya mengikuti prinsip-prinsip desentralisasi, dimulai dari bawah ke atas (*bottom up*), melibatkan masyarakat secara aktif, dan dilaksanakan bersama masyarakat (*from and with people*) (Siti Unun Fatayati, Abdul Juli Andi Gani, 2020).

Di era digital saat ini, media sosial telah berkembang pesat dan menjadi salah satu sarana komunikasi yang paling efektif dalam Menyebarkan informasi dengan cepat dan luas. Media sosial, memiliki potensi besar dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, terutama dengan aksesibilitas dan interaktivitas yang ditawarkannya. Sayangnya, belum semua pemerintah daerah memanfaatkan media sosial secara optimal untuk menyosialisasikan agenda Musrenbang dan mendorong partisipasi publik.

Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan berkomunikasi secara real-time melalui internet. Platform ini mencakup berbagai bentuk konten, seperti teks, gambar, video, dan tautan, yang dapat dibagikan dengan individu atau komunitas dalam jaringan sosial. Dalam konteks pemerintahan dan pembangunan, media sosial memiliki peran strategis untuk menyebarkan informasi secara cepat dan mendorong partisipasi masyarakat.

Sosialisasi menggunakan media sosial dapat menjangkau lebih banyak orang dalam waktu singkat dan dengan biaya lebih rendah dibandingkan metode tradisional. Selain itu,

media sosial meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena masyarakat dapat memantau proses dan memberikan umpan balik secara langsung. Pemanfaatan social media marketing dalam kegiatan pemerintahan merupakan bentuk penerapan E-Government, di mana pemerintah daerah dituntut untuk berinovasi dalam menyebarkan dan mensosialisasikan program serta kegiatan kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar informasi pemerintahan dapat tersebar dengan cepat dan masyarakat lebih mudah mengakses informasi tersebut (G R Wulus et al., 2022).

pemanfaatan media sosial yang tepat, masyarakat dapat lebih mudah mengetahui dan memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam Musrenbang. Sosialisasi melalui platform seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Twitter memungkinkan warga untuk memberikan masukan secara lebih mudah dan real-time. Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan media sosial untuk menampung ide-ide dan umpan balik, sehingga proses perencanaan menjadi lebih dinamis dan responsif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi sosialisasi melalui media sosial yang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik, sehingga pelaksanaan Musrenbang dapat berjalan lebih inklusif dan partisipatif. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan, meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan (pelaksanaan) rencana pembangunan yang sedang dikerjakan masyarakat (Fitri & Magriasti, 2020)

Partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa merujuk pada peran serta warga dalam forum musyawarah di tingkat desa, yang dilakukan bersama para pemangku kepentingan desa untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan desa, dengan tujuan untuk mencapai pemerataan pembangunan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa berfungsi sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan dan perencanaan pembangunan di desa (Hadawiya et al., 2021)

Perencanaan adalah suatu proses yang berkelanjutan yang mencakup dua aspek, yaitu penyusunan perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan berfungsi untuk mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, karena rencana tersebut berperan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan (Sosial, 2023).

Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 memaparkan bahwa perencanaan

merupakan sebuah proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. Perencanaan pembangunan adalah proses merumuskan kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien, dengan tujuan untuk menghasilkan Hasil yang maksimal dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan mengembangkan potensi yang tersedia (Sosial, 2023).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah wadah diskusi antara pemerintahan desa dan berbagai pihak terkait untuk membahas dan menyepakati program pembangunan yang dapat meningkatkan kondisi desa. Pembangunan yang efektif dimulai dengan perencanaan yang matang, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Oleh karena itu, proses perencanaan memerlukan partisipasi aktif masyarakat, salah satunya melalui pelaksanaan Musrenbang (Samad et al., 2019).

Hasil dan Pembahasan

Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa merujuk pada peran serta warga dalam forum musyawarah di tingkat desa, yang dilakukan bersama para pemangku kepentingan desa untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan desa, dengan tujuan untuk mencapai pemerataan pembangunan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa berfungsi sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan dan perencanaan pembangunan di desa (Hadawiya et al., 2021).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan publik, penguatan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah, prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan kekhasan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik efisiensi penyelenggaraan pemerintahan provinsi perlu ditingkatkan dengan lebih fokus pada hubungan antara negara dan pemerintah daerah, memperhatikan keberagaman daerah, serta memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan dalam persaingan global dalam sistem ketatanegaraan yang terintegrasi. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah diwajibkan untuk melaksanakan rencana pembangunan melalui Forum Musrenbang (Fakhira & Salam, 2023).

Partisipasi mengacu pada keterlibatan individu atau kelompok dalam suatu kegiatan yang

bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan secara sadar oleh pihak-pihak terkait. Dalam konteks pengembangan masyarakat, partisipasi mencakup keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi, dan penerimaan hasil atau perubahan yang direncanakan untuk mencapai tujuan bersama. Seseorang akan berpartisipasi jika memenuhi tiga prasyarat, yaitu peluang, keinginan, dan kemampuan. Peluang merujuk pada adanya kondisi atau lingkungan yang memungkinkan partisipasi, sementara keinginan berkaitan dengan motivasi atau dorongan seseorang untuk berbagi dan memperoleh manfaat dari partisipasinya. Kemampuan mencakup kesadaran, keyakinan, serta kemampuan dalam memberikan kontribusi, baik berupa tenaga, pikiran, waktu, atau fasilitas. Dengan demikian, partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam merumuskan perencanaan pembangunan yang melibatkan pemerintah (Studi et al., 2023).

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan sangat penting untuk memastikan bahwa program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat yang akan dilayani. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat bukan hanya sekadar formalitas, melainkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pengambilan keputusan. Dalam sistem partisipasi yang efektif, masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan masukan, saran, dan kritik, serta terlibat langsung dalam pelaksanaan program yang telah disepakati bersama. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, akan tercipta sinergi antara masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor yang ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga mereka dapat memahami dan merasakan manfaat program tersebut secara langsung (Studi et al., 2023).

Pembangunan dan perencanaan merupakan dua hal yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan, bagaikan satu kesatuan tubuh di mana setiap organ saling terhubung. Pembangunan memerlukan perencanaan, dan perencanaan harus diwujudkan dalam bentuk pembangunan, yang dimulai dari pemerintah pusat hingga ke tingkat pemerintahan daerah. Untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang ideal, diperlukan tahapan-tahapan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mencakup penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Perencanaan pembangunan daerah berfungsi untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya publik yang ada di daerah tersebut. Oleh karena itu, proses penyusunannya sangat penting dan harus

bersifat aspiratif serta mengadopsi pendekatan perencanaan yang tepat (Sholihah & Santoso, 2022).

Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Musrenbang

Faktor penghambat partisipasi masyarakat merujuk pada segala hal yang menjadi kendala atau rintangan yang menghalangi individu atau kelompok masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam suatu proses, kegiatan, atau pengambilan keputusan, baik di tingkat pemerintahan, organisasi, maupun dalam kehidupan sosial. Hambatan-hambatan ini bisa berasal dari faktor internal (dari dalam diri masyarakat) atau eksternal (dari lingkungan atau sistem yang ada). Secara umum, unsur-unsur yang menghambat partisipasi masyarakat meliputi berbagai elemen yang bisa mengurangi motivasi, kemampuan, atau kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam proses sosial, politik, atau pembangunan. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Keterbatasan Akses dan Sumber Daya; seperti kurangnya informasi, fasilitas, atau infrastruktur yang memadai.
2. Kendala Ekonomi dan Sosial: seperti keterbatasan waktu, beban ekonomi, atau faktor sosial lainnya yang menghambat partisipasi.
3. Keterbatasan Pengetahuan dan Pendidikan: rendahnya tingkat pemahaman atau pendidikan yang mengurangi kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi.
4. Kendala Psikologis dan Budaya: seperti rasa takut, kurangnya kepercayaan diri, atau norma budaya yang membatasi keterlibatan.
5. Ketidakpercayaan pada Proses atau Pemerintah : apabila masyarakat merasa partisipasi mereka tidak akan membawa perubahan atau bahwa proses tersebut tidak transparan.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut bersifat kompleks dan seringkali saling berhubungan. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh, yang meliputi peningkatan pendidikan, penyediaan informasi yang cukup, serta menciptakan ruang yang inklusif dan transparan agar semua pihak dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses perencanaan dan pembangunan.

Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pada musyawarah perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh harapan dan keinginan yang ada dalam diri mereka. Harapan dan keinginan ini merupakan dorongan dari dalam masyarakat untuk melihat perubahan yang membawa perbaikan. Masyarakat berharap ada kemajuan di lingkungan mereka, yang secara tidak langsung mendorong mereka untuk terlibat dan memberikan usulan serta pemikiran

dalam musyawarah perencanaan pembangunan. faktor yang dapat memengaruhi partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan pada musyawarah perencanaan pembangunan. Kesadaran ini muncul dari dorongan internal masyarakat, seperti rasa tanggung jawab atau rasa hormat terhadap pemerintah nagari, serta panggilan hati nurani, tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Infrastruktur dan fasilitas yang memadai, seperti tempat pertemuan yang nyaman, akses internet, serta dukungan teknologi yang memudahkan komunikasi, sangat mendukung partisipasi masyarakat. Fasilitas yang memadai juga akan mengurangi hambatan fisik dan logistik bagi mereka yang ingin terlibat.

Di era globalisasi yang dipicu oleh kemajuan teknologi digital, Indonesia tidak dapat menghindari dampak signifikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Media sosial telah menjadi tren utama dalam komunikasi sosial di era modern ini. Salah satu platform yang sangat populer adalah media online, yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah berpartisipasi, berbagi konten, dan menciptakan berbagai jenis isi seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Media sosial dapat diartikan sebagai sekumpulan aplikasi berbasis internet yang dibangun dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teknologi Web 2.0, yang memungkinkan pengguna untuk membuat serta berbagi konten yang mereka buat sendiri (Burcori, 2018). Media sosial memainkan peran yang sangat vital dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Salah satu kontribusinya adalah mempermudah akses informasi. Melalui platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp, informasi mengenai jadwal, tujuan, dan agenda Musrenbang dapat disebar dengan cepat, memungkinkan masyarakat yang tidak bisa hadir langsung untuk tetap mendapatkan informasi dan ikut serta secara online. Hal ini memastikan partisipasi yang lebih luas tanpa terkendala oleh jarak atau waktu. Selain itu, media sosial juga membantu meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam proses Musrenbang. Pemerintah dan penyelenggara dapat menyampaikan hasil pertemuan, keputusan yang diambil, dan rencana tindak lanjut melalui media sosial, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah. Dengan cara ini, proses perencanaan pembangunan menjadi lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan masyarakat.

Media sosial juga memungkinkan terbentuknya ruang diskusi dan kolaborasi yang lebih luas. Masyarakat dapat berdiskusi, berbagi ide, dan memberikan masukan melalui komentar atau grup online, sehingga tercipta interaksi yang lebih dinamis. Ini memungkinkan

masyarakat untuk berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal.

media sosial juga memberi ruang bagi kelompok minoritas untuk menyuarakan pendapat mereka. Platform ini memberikan kesempatan bagi kelompok yang terpinggirkan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, atau kelompok dengan kondisi ekonomi tertentu, untuk mengemukakan aspirasi mereka, yang membuat proses perencanaan pembangunan menjadi lebih inklusif dan adil. Secara keseluruhan, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyebarkan informasi, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam Musrenbang. Melalui media sosial, masyarakat bisa lebih mudah memberikan masukan, berinteraksi, dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga memperkuat prinsip demokrasi partisipatif dan menciptakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penutup

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui sosialisasi media sosial memainkan peran penting dalam memastikan proses perencanaan yang lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan meluas, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan berpartisipasi meskipun tidak bisa hadir secara langsung. Selain itu, media sosial menyediakan platform untuk diskusi, kolaborasi, dan Hubungan yang lebih erat antara masyarakat dan pemerintah. yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan yang berguna. Penggunaan media sosial juga memberi kesempatan bagi kelompok minoritas atau terpinggirkan untuk menyuarakan aspirasi mereka, sehingga proses perencanaan menjadi lebih adil dan merata. Dengan demikian, media sosial dapat memperkuat demokrasi partisipatif, meningkatkan kualitas perencanaan, dan mendorong terciptanya pembangunan yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Referensi

- Burcori, A. (2018). Pentingnya Literasi Digital Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Sosialisasi Pembangunan Melalui Media Sosial. *OMNICOM Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 1–6.
- Fakhira, R., & Salam, R. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan

- Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. *Pentahelix*, 1(2), 143. <https://doi.org/10.24853/penta.1.2.143-154>
- Fitri, A. L., & Magriasti, L. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(3), 109–120. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i3.73>
- G R Wulus, V., Mandagi, D. W., Lule, B., & Ambalao, S. S. (2022). Determinan Efektivitas Social Media Marketing Pada Insitusi Pemerintah Daerah. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 4(3), 522–538. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v4i3.2926>
- Hadawiya, R., Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 192–200. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>
- Samad, Z., Mustanir, A., & Pratama, M. Y. P. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Untuk Mewujudkan Good Governance Kabupaten Enrekang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(4), 379–395. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/viewFile/3014/2750>
- Sholihah, A., & Santoso, T. (2022). Pengaruh Kepercayaan Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Kelurahan Krendang Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 189–196.
- Siti Unun Fatayati , Abdul Juli Andi Gani, I. H. (2020). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Vol. 6 No. 3 (2020)*, 6(1), 389.
- Sosial, J. I. (2023). *4502-16379-1-Pb*. 7(1), 668–674. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4502/http>
- Studi, P., Publik, A., Magister, P., Musamus, U., Ilmu, F., Dan, S., & Politik, I. (2023). *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*. 12(1), 121–129.
- Uceng, A., Erfina, E., Mustanir, A., & Sukri, S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 18–32. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2126>